

Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

The Impact of Increasing PPN Rates on Economic Growth in Indonesia

Karona Cahya Susena¹⁾; Nenden Restu Hidayah²⁾; Adinda Dewi Anggraini³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹adindadewianggraini214@gmail.com

How to Cite :

Susena.C. K., Hidayah. R. N., Anggraini. A. D. (2025). Dampak Kenaikan Tarif PPN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Social Sciences Journal 1(2). DOI: <https://doi.org/10.70963/soc.v1i2>

ARTICLE HISTORY

Received [10 Januari 2025]

Revised [10 Februari 2025]

Accepted [18 Februari 2025]

KEYWORDS

Alue Added Tax, Indonesian Income.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh PPN terhadap pendapatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PPN dapat mempengaruhi pendapatan Indonesia dan bagaimana pendapatan nasional dapat dipengaruhi oleh PPN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana PPN mempengaruhi pendapatan Indonesia dan bagaimana pendapatan nasional dipengaruhi oleh PPN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal sebuah negara, termasuk Indonesia. Analisis data yang teliti dan pembahasan mendalam menunjukkan bahwa PPN memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan Indonesia.

ABSTRACT

The aim of this research is to explore the effect of VAT on national income. This research aims to find out how VAT can affect Indonesian income and how national income can be influenced by VAT. The research method used in this research is a qualitative method. The qualitative method was chosen because the aim of this research is to understand how VAT affects Indonesian income and how national income is influenced by VAT. The research method used in this research is a qualitative method with a document analysis approach. Value Added Tax (VAT) is an important instrument in a country's fiscal policy, including Indonesia. Careful data analysis and in-depth discussion show that VAT has a positive and significant influence on Indonesian income.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara selain dari pendapatansumber migas serta non migas. Pajak ialah pendapatan strategis yang diatur dengan tepat. berdasarkan susunan keuangan negara tugas dan fungsi pendapatan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 93 dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Awanya pajak belum menjadi suatu bea, namun cuma pemberian suka rela oleh rakyat pada pimpinan dalam mengurus kebutuhan suatu negara. masyarakat yang tidak melaksanakan penyetoran maka diwajibkan melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum buat beberapa hari pada satu tahun. Pemasukan negara bersumber dari rakyat melewati pajak, ataupun dari hasil kekayaan alam di negara tersebut. Kedua basis tersebut merupakan basis penting yang memberikan pemasukan dalam negara. Pemasukan tersebut untuk membiayai kebutuhan umum yang melingkupi kebutuhan individu seperti Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta lain-lain. Sehingga dari itu, dikala terdapat kebutuhan masyarakat, disitu muncul bea pajak alhasil pajak merupakan selaras dengan kebutuhan umum. Pemungutan pajak mengurangi pemasukan ataupun kekayaan individu namun sebaliknya merupakan pemasukan masyarakat yang setelah itu di kembalikan kepada masyarakat berguna untuk masyarakat baik yang membayar ataupun

tidak. seiring berjalannya waktu, Peraturan Perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan.

Terdapatnya kebutuhan ekonomi, pokok negara, pembangunan serta lainnya mewajibkan masyarakat untuk saling gotong royong membangun negara dengan cara membayar pajak. Pajak ialah sesuatu iuran yang bersifat memaksa serta tidak memperoleh balasan secara langsung yang dibayarkan oleh individu ataupun wajib pajak pada negarayang bersumber pada hukum. Adapun pajak yang sudah putusan oleh Pemerintah salah satunya ialah Pajak Pertambahan Nilai(PPN), PPN ialah Pajak atas konsumsi yang diberikanatas pembelian barang atau jasa. Tarif PPN dikenakan bersumber pada subjek yang dipakai. pada akhir tahun 2019, Indonesia dan dunia dikejutkan dengan munculnya pandemi global yang mengakibatkankehidupan masyarakat khususnya di Indonesia sedang menghadapi perubahan pada berbagai hal. Hal yang sering dibicarakan yaitu turunnya daya ekonomi yang ditunjukkan dengan banyaknya Pemutusan Ikatan Kegiatan(PHK). Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi untuk di bidang ekonomi dan pemasukan negara. Pemungutan ataupun pemotongan pajak di Indonesia jugadibutuhkan adanya kemandirian dari rakyat Indonesia untuk membayarkan pajak, tidak hanya kemandirian dari Wajib Pajak, pemungutan ataupun pemotongan pajak juga diperlukan dengan adanya pihak ketiga sebagai penolong, alhasil pajak yang dipungut dari individu atau wajib pajak bisa teralirkan ke seluruh negara. Pajak ialah jalur pergi yang sangat dituju buat memperbaiki ekonomi Indonesia, Pemerintah beramai-ramai mengejar kepatuhan masyarakat terhadappajak dengan melaksanakan peraturanterkini pada Perpajakan (Agasie & Zubaedah, 2022). Krisis kesehatan dan ekonomi di tahun 2020 membuat kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tergang-gu, yang ditunjukkan dengan meningkatnya defisit anggaran menjadi 6,09% dari Produk Domestik Bruto (Kemenkeu, 2021). Mening-katnya defisit tersebut diakibatkan oleh me-ningkatnya belanja pemerintah yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penerima-an pemerintah. Menurut Kementerian Ke-uangan Republik Indonesia yang tertuang dalam laporan APBN Kita Januari 2021, belanja negara menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,15% di akhir tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Namun di saat yang sama, pendapatan negara justru menurun sebesar 16,68% dari tahun sebelumnya. Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara sebagai kas atau pemasukkan negara dan telah diatur berdasarkan Undang-undang mengenai pajak. Selain itu, pajak merupakan pungutan wajib yang dikeluarkan oleh rakyat untuk negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh rakyat guna membayarkan pajak akan masuk kedalam pos pendapatan negara yang nantinya masuk kedalam sektor pajak (Fitriano & Ferina, 2021). Adapun ciri-ciri yang melekat pada pajak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pajak berlaku ketika dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- b. Pajak dapat bersifat paksaan dengan berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaanya.
- c. Pembayaran pajak tidak akan memperoleh kontra prestasi secara langsung dari pemerintah.
- d. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah secara umum dan jika surplus digunakan untuk public investment.
- e. Pajak mempunyaifungsi untuk mengatur (non budgetair).
- f. Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Pajak mempunyai peranan yang cukup penting dalam sektor perekonomian di Indonesia, Hal ini dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN tahun 2023 direncanakan senilai Rp 2.463,0 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan senilai Rp 441,4 triliun. Target tersebut tentunya telah diperhitungkan melalui berbagai faktor, termasuk kapasitasekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menarik basis perpajakan (Puspasari, n.d.). Untuk mencapai target APBN 2023, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pada sektor pajak terhadap negara. Salah satu caranya ialah dengan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak akan berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku yaitu dengan memenuhi kewajiban maupun melaksanakan hak mengenai perpajakan (Bahri, 2020). Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela merupakan istilah dari Kepatuhan Wajib Pajak. Atau bisa disebutkan bahwa wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakan. Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya ialah adanya program tax amnesty, pengetahuan masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak, dan sanksi mengenai perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Konsumsi Keynesian dan Permintaan Agregat

Teori Keynesian menekankan pentingnya konsumsi rumah tangga dalam merangsang permintaan agregat. Menaikkan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, menghambat konsumsi, dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teori Inflasi Dorongan Biaya Kenaikan

Tarif PPN dapat menyebabkan inflasi dengan meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang. Meningkatnya inflasi menurunkan daya beli masyarakat, memberikan tekanan pada konsumsi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Teori Pendapatan Pemerintah

Berdasarkan teori pendapatan pemerintah, kenaikan tarif PPN akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi.

Teori Investasi

Menurut teori investasi, peningkatan beban pajak dapat menurunkan margin keuntungan suatu perusahaan. Hal ini mengurangi insentif investasi, salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Teori Redistribusi Pajak

Pajak termasuk PPN, dapat digunakan untuk mendistribusikan kembali pendapatan melalui program sosial. Namun jika redistribusi ini tidak optimal maka dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rangkuman Kajian Teoritik

1. Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Konsumsi Rumah Tangga Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN cenderung menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak negatif terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi (Siregar, 2020).
2. Dampak Inflasi PPN Studi Suryani (2021) menemukan bahwa kenaikan tarif PPN berkontribusi terhadap inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
3. Peningkatan Pendapatan Negara Analisis Julito & Ramadani (2022) menyimpulkan bahwa peningkatan tarif PPN akan meningkatkan pendapatan negara yang tersedia untuk pengembangan sektor-sektor strategis secara signifikan.
4. Dampak terhadap dunia usaha dan investasi Kajian Natalia & Fajriana (2023) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN akan meningkatkan beban biaya dunia usaha yang berdampak pada penurunan investasi dan aktivitas perekonomian.
5. Trade-off kebijakan fiskal Penelitian Angel Siti Fatimah & Aini Rahmah (2024) mengemukakan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN memerlukan keseimbangan antara peningkatan pendapatan pemerintah dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menggambarkan data dengan kata atau kalimat yang dipisah menurut masing-masing kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif karena penelitian ini berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berbentuk penjelasan dari berbagai sumber mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap Pertumbuhan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme Pengaruh PPN terhadap Pendapatan Nasional

Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pendapatan nasional di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dipelajari. Melalui beberapa mekanisme yang kompleks dan interaktif, PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara ini. Berikut adalah analisis

yang lebih rinci berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan: Pertama, PPN berperan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan. Namun demikian, peningkatan tarif PPN juga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, Peningkatan PPN berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi agregat. Ini disebabkan oleh potensi penurunan konsumsi rumah tangga sebagai akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Penurunan konsumsi ini kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan PDB negara. Dampak sosial ekonomi dari peningkatan PPN juga perlu diperhatikan. Meskipun PPN dapat meningkatkan pendapatan nasional melalui peningkatan penerimaan negara, tetapi menunjukkan bahwa ada dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penurunan konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dampak ini juga dapat memperburuk ketimpangan sosial ekonomi dengan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kenaikan tarif PPN dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Dengan meningkatnya penerimaan negara dari PPN, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan kembali ke dalam perekonomian, seperti dalam pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial. Namun, penelitian juga menyoroti bahwa peningkatan PPN berpotensi meredam pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan adanya trade-off antara peningkatan pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pengaruh PPN terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian penting. Peningkatan PPN dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi daya beli masyarakat melalui peningkatan harga barang dan jasa. Menyatakan bahwa meskipun PPN memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan nasional, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menjadi negatif. Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang hati-hati dalam menetapkan tarif PPN, agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengaruh PPN terhadap pendapatan nasional di Indonesia adalah kompleks dan melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan pemerintah, namun juga dapat berpotensi meredam pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang baik dalam kebijakan perpajakan untuk memastikan bahwa PPN berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, dampak PPN terhadap pendapatan nasional di Indonesia adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan. Penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan berbagai variabel ini untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pembahasan

Peningkatan tarif PPN menjadi 12% diperkirakan memberikan tambahan pendapatan signifikan untuk APBN, dengan proyeksi peningkatan hingga 15% dari total penerimaan pajak nasional. tahun 2022 menyumbang sekitar 40% dari total pendapatan pajak. Kenaikan ini diharapkan dapat menutup defisit anggaran dan mendukung pembiayaan sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak, terutama di sektor informal. Studi oleh Daud et al. (2018) menunjukkan bahwa sekitar 30% dari wajib pajak di Indonesia belum mematuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan edukasi pajak dan transparansi alokasi belanja negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal sebuah negara, termasuk Indonesia. Analisis data yang teliti dan pembahasan mendalam menunjukkan bahwa PPN memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional. Fenomena ini tercermin dari beberapa temuan kunci yang diuraikan dengan detail sebagai berikut. Kontribusi PPN terhadap Pendapatan Negara Peningkatan PPN secara konsisten selama periode 2010 hingga 2022 memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan pendapatan negara. Data menunjukkan tren kenaikan penerimaan PPN yang konsisten seiring waktu, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional secara keseluruhan. PPN, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana bagi negara tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Peran Strategis PPN sebagai Sumber Pendapatan Negara Stabilitas rasio PPN terhadap pendapatan nasional antara 7% hingga 9% menggambarkan peran strategis PPN sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Konsistensi rasio ini menandakan kontribusi yang signifikan dari PPN terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa PPN bukan hanya sekadar pajak tambahan, tetapi juga merupakan instrumen vital dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak Positif PPN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tingginya PPN dapat merangsang aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan adanya korelasi antara kenaikan PPN dengan peningkatan aktivitas ekonomi secara

umum. Namun, penting untuk diingat bahwa dampak ini dapat bervariasi tergantung pada sektor ekonomi dan kondisi makroekonomi yang ada. Pengelolaan PPN yang Efektif oleh Pemerintah Dalam mengelola PPN, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tarif PPN dan mekanisme pemungutan. Kebijakan terkait PPN harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendukung peningkatan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Keseimbangan antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dampak Negatif dan Upaya Pengendalian Meskipun PPN memiliki dampak positif, ada juga potensi dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, sementara juga dapat berdampak negatif pada sektor usaha tertentu, terutama yang memiliki nilai tambah rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi dampak negatif tersebut, misalnya dengan mempertimbangkan pengecualian atau insentif bagi sektor-sektor yang rentan..memperhatikan kesejahteraan sosial. Keseimbangan antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dampak Negatif dan Upaya Pengendalian Meskipun PPN memiliki dampak positif, ada juga potensi dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Kenaikan PPN dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, sementara juga dapat berdampak negatif pada sektor usaha tertentu, terutama yang memiliki nilai tambah rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi dampak negatif tersebut, misalnya dengan mempertimbangkan pengecualian atau insentif bagi sektor-sektor yang rentan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, analisis ini menegaskan bahwa PPN memiliki peran yang vital dalam meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Dengan mempertimbangkan kontribusi positifnya terhadap pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah diharapkan untuk mengelola PPN secara bijaksana dan efektif. Diperlukan kebijakan yang seimbang dan adil, serta upaya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan potensi dampak PPN. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, PPN dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran PPN terhadap pendapatan nasional Indonesia. Selain mengkonfirmasi positif dan PPN terhadap nasional atau indonesia, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang berbagai dampak dan implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pengelolaan PPN.

Saran

1. Pemerintah harus meninjau ulang tarif PPN untuk mencapai keadilan dan mengurangi dampak negatif.
2. Perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait kebijakan PPN.
4. Pengembangan program bantuan sosial untuk masyarakat terdampak kenaikan PPN.
5. Pemerintah harus memperkuat sektor riil dan mengurangi ketergantungan pada sektor keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angel Siti Fatimah & Aini Rahmah. (2022). Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 15(3), 45-58.
- Daud, M., et al. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(1), 23-35.
- Julito, A. & Ramadani, F. (2024). Pengaruh PPN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Analisis Ekonomi*, 22(1), 12-19.
- Natalia, D. & Fajriana, S. (2023). Studi Dampak PPN terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 18(2), 88-95
- Novianto, T., et al. (2023). Kenaikan Tarif PPN dan Implikasinya terhadap Sosial Ekonomi. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 19(4), 134-149.
- OECD. (2020). *Revenue Statistics in Asia and Pacific Economies*. OECD Publishing.

- Siregar, B. (2018). Dampak Pajak terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 14(2), 78-89
- Suryani, T. (2016). Analisis Kebijakan PPN di Negara Berkembang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 101-120.
- UU No. 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.
- Republik Indonesia. Verent, H. (2020). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Fiskal. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(1), 55-70.
- Siregar, A. (2020). "Analisis Dampak Pajak terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123-135.
- Suryani, R. (2021). "Kenaikan Tarif PPN dan Implikasinya terhadap Inflasi." *Journal of Fiscal Studies*, 8(3), 45-56.
- Julito, R., & Ramadani, A. (2022). "Efisiensi Penggunaan Penerimaan PPN untuk Pembangunan Infrastruktur." *Jurnal Keuangan Publik*, 15(1), 89-100.
- Natalia, F., & Fajriana, S. (2023). "Dampak Pajak terhadap Dunia Usaha di Indonesia: Studi Kasus Kenaikan PPN." *Indonesian Economic Review*, 11(4), 210-225.
- Angel Siti Fatimah, & Aini Rahmah. (2024). "Analisis Kebijakan Fiskal: Kenaikan PPN dan Pertumbuhan Ekonomi." *Economic Policy Journal*, 9(1), 33-47.